

PEMBAKUAN EKSONIM SEBAGAI BAGIAN DARI LANGKAH STRATEGIS INTERNASIONALISASI BAHASA INDONESIA

Umrotun Nida

Departemen Ilmu Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
umrotun.nida@ui.ac.id

Submitted: 10-02-2025; Accepted: 08-04-2025; Published : 23-04-2025

ABSTRAK

Sebagai salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di Asia Tenggara, Bahasa Indonesia secara signifikan bertransformasi menjadi bahasa yang mampu beradaptasi dengan perubahan dunia. Salah satu arah perubahan tersebut bertujuan membawa bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional demi meningkatkan martabat bangsa Indonesia dalam percaturan global. Meskipun demikian, Bahasa Indonesia masih perlu mengembangkan kesiapan internal untuk membuktikan kemampuannya beradaptasi. Salah satu yang perlu dilakukan adalah ditetapkan pembakuan eksonim sesuai tata aturan bahasa Indonesia. Eksonim merupakan nama yang digunakan dalam bahasa tertentu untuk fitur geografis yang terletak di luar area di mana bahasa itu digunakan, yang mana pada saat ini bahasa Indonesia belum memiliki set eksonim lengkap yang dapat menjadi pedoman penulisan. Oleh karena itu, dengan mengadaptasi metode Perencanaan Bahasa Haugen (1966), Fishman *et al.* (1971), dan Moeliono (1981) penelitian ini bertujuan memaparkan pentingnya pembakuan eksonim serta perencanaan yang perlu dilakukan demi tercapainya fungsi internasionalisasi bahasa Indonesia. Berdasarkan analisis, pembakuan eksonim sebagai salah satu langkah penting yang dapat menunjang internasionalisasi bahasa Indonesia perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian yang didukung oleh pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat.

Kata kunci: Eksonim, Perencanaan Bahasa, Internasionalisasi Bahasa Indonesia

ABSTRACT

*As one of the most widely spoken languages in Southeast Asia, Indonesian has significantly transformed into a language that is able to adapt. This adaptation is aimed at making Indonesian an international language to increase the dignity of the Indonesian nation. However, the Indonesian language still needs to develop internal readiness to prove its ability to adapt. One thing that needs to be done is to establish standardization of exonyms according to Indonesian language rules. Exonyms are names used in a particular language for geographical features located outside the area where the language is spoken, and currently Indonesian does not have a complete set of exonyms that can be used as guidance. Therefore, by adapting the Language Planning method of Haugen (1966), Fishman *et al.* (1971), and Moeliono (1981), this study aims to explain the importance of standardization of exonyms and the planning that needs to be done in order to achieve the internationalization function of Indonesian. Based on the analysis, standardization of exonyms as one of the important steps that can support the internationalization of Indonesian requires planning, implementation, and assessment supported by the stakeholders, both government and society.*

Keyword: Exonym, Language Planning, Internationalization of Bahasa Indonesia

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di Asia Tenggara. Bahasa Indonesia sejauh ini memiliki

jumlah penutur terbesar dari setiap bahasa Austronesia, dengan perkiraan 180 juta penutur pada awal abad ke-21 (Sneddon, 2003). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Indonesia mencatat bahwa bahasa Indonesia telah tersebar setidaknya di 47 negara (kemdikbud.go.id). Di sisi lain, Lauder (2024) memaparkan bahwa saat ini sekurang-kurangnya terdapat Program Studi Indonesia di 54 negara di dunia. Selain itu, bahasa Indonesia juga telah ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh bahasa resmi yang digunakan UNESCO dalam konferensi umum pada tahun 2023 (setkab.go.id). Hal demikian menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang dianggap penting oleh masyarakat dunia.

Dalam perjalanannya, Bahasa Indonesia telah mengalami banyak transformasi sebagai upaya pengembangan ke arah global. Hal demikian menurut Alisjahbana (1976) terjadi sebagai akibat dari adanya pergeseran nilai yang sebelumnya didominasi nilai agama menjadi nilai sains dan ekonomi yang dibawa oleh Eropa menjadikan bangsa Asia secara bertahap berubah menjadi sekuler. Hal ini menyebabkan perilaku tradisional standard digantikan dengan cepat oleh sistem perilaku baru pada generasi muda untuk masuk dalam revolusi (Alisjahbana, 1976). Hal tersebut mengarah pada kenyataan bahwa bahasa secara alamiah mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan dunia.

Perubahan bahasa adalah sebuah keniscayaan. Selama bahasa itu dipakai maka akan selalu dalam proses perubahan sebagaimana yang diungkapkan oleh Trask (2010) bahwa setiap bahasa yang hidup, yaitu bahasa yang masih dipelajari anak-anak, selalu dalam proses perubahan. Usaha pengembangan bahasa bertolak dari kenyataan bahwa bahasa yang bersangkutan harus menjalankan peranan kemasyarakatan dalam berbagai bidang yang terus berubah dan berkembang sehingga tercapai kestabilan politik dan integrasi sosial budaya (Moeliono, 1981). Untuk menangani hal tersebut, Alisjahbana (1976) menawarkan ilmu perencanaan atau rekayasa bahasa dengan tujuan membangun bahasa sebagai sarana komunikasi dan ekspresi yang paling efisien untuk masyarakat dan budaya baru.

Berkenaan dengan transformasi itu, bahasa Indonesia setidaknya telah berkembang pesat melalui empat fase perkembangan yang dipaparkan dalam Kongres Bahasa Indonesia XII, yaitu (1) fase persemaian yang dicetuskan

pada Kongres Pemuda Ke-2 yang menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda, (2) fase pengukuhan status bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, (3) fase perumusan dan pengembangan yang ditandai dengan penyusunan perangkat dan kaidah kebahasaan dan kesastraan, dan (4) fase internasionalisasi yang bertujuan untuk lebih meningkatkan martabat bangsa Indonesia dalam percaturan global. Pada periode ini, bahasa Indonesia telah memasuki fase keempat, dimana bahasa Indonesia saat ini sedang dalam upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1 ayat (1).

Menurut Lauder (2024) konsekuensi internasionalisasi bahasa Indonesia salah satunya adalah perlunya kesiapan bahasa Indonesia dalam hal konstruksi internal, referensi kebahasaan, materi penunjang, dan manajemen kebahasaan sebagai langkah pembinaan dan pengembangan bahasa. Dalam hal konstruksi internal dan referensi kebahasaan, bahasa Indonesia sangat memerlukan penelitian dan analisis yang mendalam (Lauder, 2024). Hal tersebut juga dikemukakan oleh Ridlo *et al.* (2019) bahwa analisis situasi bahasa merupakan elemen penting dari proses menentukan perencanaan bahasa di sebuah negara. Berkaitan dengan upaya bahasa Indonesia untuk menjadi salah satu bahasa Internasional di tengah arus globalisasi yang memungkinkan masyarakat Indonesia banyak terpapar bahasa Inggris dan bahkan bahasa lain yang juga dianggap penting, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dari adanya perubahan bahasa akibat globalisasi adalah penggunaan eksonim.

United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) mendefinisikan eksonim sebagai nama yang digunakan dalam bahasa tertentu untuk fitur geografis yang terletak di luar area di mana bahasa itu digunakan, dan berbeda bentuknya dari nama yang digunakan dalam bahasa resmi atau mapan di daerah di mana fitur geografis berada (ungegn.zrc-sazu.si). Contohnya adalah penyebutan Belanda bagi penutur bahasa Indonesia untuk menyebut nama internasional dari *the Netherlands*, Inggris untuk menyebut *England*, atau Amerika Serikat untuk menyebut *the United States of America*. Penyebutan

eksonim tersebut, menunjukkan kemampuan bahasa Indonesia dalam proses standarisasi serta adaptasi dalam mengadopsi elemen internasional sehingga memperkuat posisinya sebagai bahasa yang mampu bersaing di kancah global.

Meskipun demikian, Lauder (2024) melaporkan bahwa ahli leksikografi di Indonesia agaknya belum memberikan perhatian serius terhadap upaya pembakuan penulisan eksonim dalam bahasa Indonesia sehingga terjadi penulisan atau penyebutan eksonim yang kurang tertata. Dalam praktiknya, penggunaan eksonim sangat penting untuk memastikan bahwa semua dokumen resmi, media massa, dan publikasi menggunakan istilah yang sama dalam menyebut sebuah tempat dari negara lain sehingga meminimalisasi munculnya kebingungan dan dapat meningkatkan kejelasan. Dengan adanya eksonim yang baku, masyarakat memiliki pedoman resmi tentang bagaimana menyebut dan menulis nama-nama tempat asing, baik dalam konteks lokal maupun internasional. Pendapat tersebut didukung oleh Lauder (2024) yang memaparkan bahwa penting untuk membuat set eksonim yang lengkap sesuai tata aturan bahasa Indonesia karena perannya untuk mewartakan segala sesuatu mengenai nama negara lain, dan bukan hanya tertera di kamus melainkan juga harus tercatat dalam Gasetir Nasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tahap awal perencanaan pembakuan eksonim dalam bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan perumusan dalam adaptasi fonologis dan pedoman penulisan unsur serapan ke dalam bahasa Indonesia (Lauder, 2024). Misalnya pada kasus pengucapan nama negara yang memiliki pelafalan konsonan /θ/ seperti pada Thailand, eksonim negara tersebut tetap dituliskan secara ortografis ke dalam bahasa Indonesia sebagai Thailand. Namun, di sisi lain, penulisan nama negara Lithuania dalam eksonim bahasa Indonesia mengikuti aturan serapan umum bahasa Indonesia yang mengganti bunyi *th* menjadi *t* sehingga nama eksonim negara tersebut menjadi Lituania. Pembakuan tersebut perlu mendapat *exposure* (paparan) sehingga dapat diterima dan tidak menimbulkan resistensi bagi penutur bahasa Indonesia.

Haugen (1966) menganjurkan perencanaan bahasa dimulai dengan pengetahuan situasi kebahasaan, dilanjutkan dengan penetapan garis haluan dan prosedur untuk pelaksanaan program, setelah itu dilakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, Haugen (1996) memaparkan empat tahap perencanaan bahasa menjadi: 1) seleksi sebagai upaya pemilihan norma bahasa, 2) kodifikasi berkaitan dengan penyusunan aturan bahasa (misalnya ejaan) yang terpilih, 3) elaborasi sebagai fungsi pengembangan bahasa dalam kosakata keilmuan tertentu, dan 4) penerimaan masyarakat sebagai upaya penyebarluasan bahasa yang terpilih.

Hal tersebut senada dengan Fishman *et al.* (1971) yang membagi prosedur perencanaan bahasa menjadi empat proses yaitu: 1) perumusan kebijakan yang berkaitan dengan keputusan organisasi atas alokasi fungsional kode dalam komunitas tutur atau karakteristik dari satu atau lebih kode dalam matriks kode (repertoar linguistik) dari komunitas tersebut., 2) kodifikasi yang berkaitan dengan normalisasi (standarisasi) regional, sosial, kelas, atau variasi lain dalam penggunaan melalui persiapan tata bahasa, kamus, panduan ortografi, dll, 3) elaborasi berkaitan dengan kebutuhan untuk intertranslatabilitas dengan satu atau lebih bahasa yang beragam secara fungsional, dan 4) implementasi yang mengacu pada semua upaya untuk mendapatkan penerimaan kebijakan dan produk perencanaan bahasa.

Pada literatur yang lain, Moeliono (1981) mengadaptasi perencanaan bahasa ke dalam tiga tahap yakni 1) perencanaan, yang terdiri atas paparan jawaban pertanyaan siapa pelaksana perencanaan, apa dan siapa sasaran perencanaan, bagaimana proses perencanaan berlangsung, dan persyaratan apa yang harus dipenuhi agar tercapai keberhasilan program, 2) pelaksanaan, yang secara luas melingkupi pengembangan sandi bahasa, pembinaan pemakaian bahasa, serta pemasaran, dan 3) penilaian, yang terdiri atas monitoring serta penimbangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan memaparkan pentingnya pembakuan eksonim sebagai salah satu upaya strategis dalam internasionalisasi

bahasa Indonesia dan menawarkan langkah strategis perencanaan bahasa Indonesia terkait pembakuan eksonim. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan proses mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur, hasil kajian (hasil penelitian) atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan (Amruddin, 2022).

Selanjutnya, sebagai bagian dari perencanaan bahasa, pembakuan eksonim tidak dapat dilakukan tanpa adanya metode yang tepat yang berkesesuaian dengan preferensi penutur bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan dalam makalah ini memaparkan perencanaan bahasa mengenai pembakuan eksonim dengan mengadaptasi tahapan-tahapan perencanaan bahasa berdasarkan Haugen (1966), Fishman *et al.* (1971) dan Moeliono (1981) yang telah dipaparkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha perencanaan bahasa Indonesia berkaitan dengan pembakuan eksonim dalam artikel ini secara garis besar mengadopsi alternatif perencanaan bahasa yang dikembangkan oleh Moeliono (1981) yang terdiri atas tiga aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Meskipun demikian dalam pembahasannya dielaborasi tahapan lain yang relevan berdasarkan Haugen (1966) dan Fishman *et al.* (1971). Tahapan tersebut diambil untuk memastikan perencanaan pembakuan eksonim dalam bahasa Indonesia dapat berfungsi secara efektif sebagai bagian dari langkah strategis internasionalisasi bahasa Indonesia

A. Perencanaan

Perencanaan bahasa pada sektor pembakuan eksonim perlu mendapat perhatian khusus karena urgensinya untuk dapat mengikuti perkembangan global dan integrasi teknologi informasi. Situasi di Indonesia saat ini adalah bahwa sementara eksonim ada untuk sebagian besar tempat, ejaan eksonim dalam bahasa Indonesia belum distandardisasi (Lauder & Lauder, 2015). Misalnya dalam penyebutan eksonim bahasa Indonesia untuk Island, England, dan Thailand. Ketiga negara tersebut memiliki

struktur konstruksi kata konsonan – vokal – konsonan - konsonan (KVKK) pada *Island*, *England*, dan *Thailand*. Namun, pada praktiknya tiga eksonim tersebut memiliki perbedaan adaptasi menjadi *Islandia* untuk *Island*, Inggris untuk *England*, dan *Thailand* untuk *Thailand*. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseragaman ejaan eksonim dalam bahasa Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, perencanaan bahasa pada pembakuan eksonim erat kaitannya dengan adaptasi fonologis dan kaidah penulisan unsur serapan. Di situasi terkini, Badan Bahasa telah menerbitkan pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) V sebagai referensi standarisasi bahasa Indonesia. Di dalamnya terdapat uraian kaidah penulisan unsur serapan yang diperinci dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUI). Unsur bahasa sumber diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan memprioritaskan bentuk. Penyerapan bentuk tersebut meliputi huruf, gabungan huruf, dan imbuhan. Kaidah yang berkaitan dengan imbuhan dijelaskan dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUI). Meskipun demikian, belum ada pedoman khusus yang dapat menjelaskan penyerapan atau pembentukan istilah untuk eksonim. Hal tersebut menimbulkan adanya ketidakjelasan pedoman pembentukan eksonim dalam bahasa Indonesia.

Pembentukan eksonim memang bukan hal yang mudah karena penggunaan eksonim dapat menjadi bermasalah jika tidak memenuhi beberapa kriteria seperti kemudahan pengucapan, konsistensi, atau tidak memperhatikan sensitivitas budaya dan politik. Oleh karena itu, pembakuan eksonim memerlukan keterlibatan banyak pihak diantaranya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai pihak yang berwenang menetapkan standard pedoman penulisan bahasa Indonesia. Selanjutnya diperlukan usaha yang besar dari Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang bertanggung jawab melakukan inventarisasi dan validasi nama-nama rupabumi. Usaha yang dilakukan Tim Nasional Pembakuan Rupabumi tidak terlepas dari dibutuhkannya para ahli di bidang toponimi (studi tentang nama tempat). Oleh karena itu, lembaga

pendidikan dan para akademisi di bidangnya perlu mendedikasikan ilmunya untuk dapat mendukung perencanaan pembakuan eksonim. Selanjutnya, peran media massa, penerbit, dan seluruh instansi untuk dapat menyebar penggunaan eksonim yang telah dibakukan kepada masyarakat perlu ditingkatkan.

Pembakuan eksonim dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk mencapai konsistensi, akurasi, dan keseragaman dalam penggunaan nama-nama geografis di luar wilayah Indonesia. Masyarakat penutur bahasa Indonesia merupakan sasaran luas yang menjadi tujuan utama perencanaan bahasa terkait pembakuan eksonim. Namun, secara terperinci dapat dikatakan bahwa sasaran pembakuan eksonim secara bertahap dapat disebarluaskan melalui lembaga pemerintah, institusi pendidikan, media massa, komunitas akademik, masyarakat umum, serta organisasi internasional.

Selanjutnya, dalam perencanaan perlu disusun strategi yang dapat memastikan tercapainya tujuan perencanaan pembakuan eksonim. Secara umum Moeliono (1981) menerangkan bahwa strategi berkaitan dengan penentuan sarana dan saluran apa yang terbaik untuk menyebarkan hasil usaha perencanaan di antara khalayak sasaran. Oleh karena itu, dalam upaya pembakuan eksonim untuk dapat tersebar ke berbagai sasaran secara menyeluruh, perlu diupayakan usaha-usaha diantaranya sosialisasi, pelatihan, publikasi pedoman, dan kolaborasi antar lembaga maupun individu. Setiap sasaran diarahkan untuk dapat menggunakan eksonim yang benar dan konsisten, sehingga tujuan perencanaan bahasa dapat tercapai dengan efektif.

Setelah seluruh rangkaian perencanaan terpenuhi, pengambilan putusan dibutuhkan sebagai langkah yang kuat dan mengikat secara pasti. Agar putusan menyangkut pembakuan eksonim tersebut berhasil, Haugen (1966) menyebutkan bahwa putusan tersebut harus: 1) efisien dalam arti bentuk baku eksonim mudah dipelajari dan dipakai, 2) adekuat yaitu bentuk yang diatur oleh panduan pembakuan eksonim mampu menyampaikan informasi yang diinginkan dengan ketepatan yang memadai, dan 3)

berterima, yaitu bentuk pembakuan eksonim disetujui dan ditunjang pemakaiannya oleh golongan elit yang berimplikasi pada adanya kekuasaan, pendidikan, keturunan, dan kekayaan.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan perencanaan pembakuan eksonim terbagi menjadi tiga aspek, yakni pengembangan sandi bahasa, pembinaan pemakaian bahasa, dan pemasaran yang akan dijelaskan dalam sub pembahasan berikut.

1. Pengembangan Sandi Bahasa

Pengembangan sandi bahasa erat kaitannya dengan tahap kodifikasi dan elaborasi yang dipaparkan oleh Haugen (1966) dan Fishman *et al.* (1971). Kodifikasi berkaitan dengan standarisasi norma untuk tata ejaan, tata bahasa, kosakata, dan norma berbagai ragam fungsional bahasa yang dimekarkan sehingga sandi bahasa itu, dalam hal ini eksonim, dapat memenuhi syarat kepaduan yang dituntut oleh berbagai jenis wacana. Sedangkan elaborasi merujuk pada proses penyesuaian fungsi sandi bahasa seperti pada penentuan bentuk eksonim yang diperlukan. Pada tahap ini perlu kerja keras Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk berkolaborasi dengan para linguist agar dapat menciptakan referensi kebahasaan terkait pembakuan eksonim yang mempertimbangkan kaidah bahasa Indonesia maupun kaidah internasional sehingga tidak saling bertolak belakang. Hal tersebut berkaitan dengan rekomendasi UNGEGN kepada pemerintah dengan tujuan standarisasi nama geografis di tingkat nasional, yang dianggap sebagai pendahulu mendasar untuk standarisasi internasional (Luxán & Tagle, 2022).

Dalam proses kodifikasi dan elaborasi, perlu mempertimbangkan beberapa kriteria berdasarkan konferensi PBB yang dijabarkan oleh Jordan (2007). Kriteria tersebut

diantaranya adalah pertama, penggunaan eksonim lebih tepat untuk fitur geografis yang penting seperti benua, wilayah besar yang melebihi batas negara, nama-nama negara, ibu kota negara dan kota besar lainnya, gunung, lanskap, sungai dan danau yang besar. Kedua, eksonim lebih tepat digunakan bagi fitur geografis yang memiliki kontinuitas historis panjang sehingga endonim mereka saat ini bukanlah endonim pada periode sebelumnya, atau bahkan fitur yang endonimnya tidak tersedia sehingga tidak ada pilihan lain selain menggunakan eksonim, misalnya *Ottoman Empire*. Fitur-fitur tersebut membentuk dasar pengetahuan topografi dan harus mudah diingat karena adanya kemudahan ejaan dan ucapan.

Dalam literatur lain kriteria dasar penggunaan eksonim dapat diringkas sebagai berikut: 1) hormati eksonim yang sudah ada, 2) hindari eksonim tradisional yang tidak digunakan, 3) gunakan system romanisasi yang disetujui secara internasional, 4) hindari pembuatan eksonim baru, kecuali bila diperlukan, misalnya dalam kasus luar biasa perlu menggunakan nama baru sebagai tanggapan terhadap perubahan penggunaan dan kebutuhan untuk memberi nama realitas baru (Woodman, 2016). Berdasarkan kriteria tersebut, pembakuan eksonim harus mempertimbangkan proses identifikasi dan dokumentasi eksonim yang sudah ada dan digunakan secara luas dalam bahasa Indonesia sehingga tidak menimbulkan kegaduhan penggunaan di masyarakat.

2. Pembinaan Pemakaian Bahasa dan Pemasaran

Tahap selanjutnya adalah pembinaan pemakaian eksonim yang telah dibakukan. Dalam tahap ini kegiatan yang dapat dilakukan menurut Moeliono (1981) diantaranya adalah penyebaran hasil kodifikasi di

kalangan masyarakat sasaran, berbagai usaha penyuluhan, dan pembimbingan dalam pemakaian bahasa yang baik dan benar. Tahap ini meliputi proses penerimaan oleh masyarakat (Haugen, 1966) dan implementasi (Fishman *et al.*, 1971).

Pada tahap ini dapat dipaparkan proses pembinaan sekaligus strategi pemasaran berdasarkan sasaran perencanaan bahasa sebagai berikut:

1. Lembaga Pemerintah dan Birokrasi

Proses penyebaran di lembaga pemerintahan dan birokrasi menjadi tolok ukur pertama dalam penggunaan eksonim yang telah dibakukan. Lembaga pemerintah sebagai organisasi yang terdepan dalam pengeluaran dokumen-dokumen resmi berbahasa Indonesia harus lebih dulu menggunakan eksonim sesuai dengan tata aturan standard yang telah dibuat oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Oleh karena itu, dalam pembinaannya, perlu disediakan panduan dan daftar eksonim yang telah baku dan dapat diakses dengan mudah oleh masing-masing departemen dan lembaga pemerintah. Langkah tersebut sebagai bagian dari usaha untuk memastikan bahwa semua dokumen resmi, kebijakan, dan komunikasi pemerintah menggunakan eksonim yang telah dibakukan melalui pedoman dan peraturan resmi. Hal ini akan dapat menimbulkan kejelasan pemakaian eksonim di kalangan pemerintahan sekaligus bagi penerima kebijakan.

2. Institusi Pendidikan

Proses penyebaran di lingkungan pendidikan perlu mengintegritaskan eksonim baku ke dalam kurikulum pendidikan, khususnya pada bidang geografi, sejarah, dan bahasa Indonesia. Penyebutan serta penulisan

eksonim yang baku dalam materi ajar dan bahan ajar dapat menjadi paparan paling efektif bagi anak-anak sebagai bagian yang terintegrasi dalam proses belajar di sekolah. Anak-anak akan mendapatkan paparan eksonim tersebut sebagai pemerolehan bahasa. Meskipun demikian, sebagai lembaga pendidikan, perlu kiranya untuk memberikan paparan mengenai endonim sebagai bentuk pengetahuan. Hal ini senada dengan rekomendasi Jordan (2007) bahwa eksonim dan endonim lebih baik dituliskan beriringan jika bahasa endonim bukanlah bahasa sekunder, pendidikan, atau perdagangan, yang familiar bagi penutur bahasa eksonim sehingga secara kasar anak-anak dapat memperoleh bagaimana mengeja dan mengucapkan endonim yang berkaitan.

3. Media Massa dan Penerbit

Peran media massa dan penerbit menjadi kunci terpenting dalam penyebaran eksonim bagi masyarakat secara lebih luas. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur penyiaran informasi melalui berbagai media yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dengan redaksi surat kabar, majalah, stasiun televisi, dan radio untuk memastikan penggunaan eksonim digunakan secara benar pada setiap publikasi dan siaran. Untuk mencapai target tersebut, perlu dilakukan sosialisasi atas pedoman umum pembentukan istilah, khususnya daftar eksonim baku yang lengkap kepada pelaku industri media massa. Selain itu, penggunaannya perlu diawasi oleh pihak editor atau bahkan komisi penyiaran sebagai bentuk tanggung jawab atas informasi yang tersebar di masyarakat. Di sisi lain, pelatihan bagi jurnalis dan editor

mengenai eksonim dapat menjadi langkah penting untuk mencegah kesalahan penulisan eksonim sedini mungkin.

4. Akademisi dan Peneliti

Peran akademisi dan peneliti dalam penyebaran eksonim baku dapat dilakukan melalui pelatihan dan seminar akademik mengenai pentingnya pembakuan eksonim dan implementasinya dalam publikasi. Hal tersebut menjadi transmisi efektif bagi mahasiswa yang mengenyam pendidikan tinggi sehingga menimbulkan kesadaran pentingnya penggunaan eksonim baku sebagai bentuk standard dalam penulisan akademik. Selain itu, pengenalan mengenai pentingnya pembakuan eksonim dapat meningkatkan minat mahasiswa di bidang toponimi sehingga bidang keilmuan mengenai penamaan tempat dapat berkembang dan dapat menjadi penunjang pembangunan nasional dalam hal penamaan rupabumi di Indonesia.

5. Organisasi Internasional

Sebagai langkah internasionalisasi bahasa Indonesia, eksonim hadir sebagai adaptasi global untuk mempermudah transliterasi dan terjemahan. Dengan eksonim yang sudah dibakukan, proses transliterasi dan terjemahan dalam dokumen resmi internasional dapat menjadi lebih akurat. Hal tersebut menjadi penting mengingat tujuan bahasa Indonesia yang sedang dalam proses meningkatkan fungsi sebagai salah satu bahasa resmi PBB. Hal tersebut dapat dilakukan saat ini misalnya dengan memastikan penggunaan eksonim dalam dokumen resmi UNESCO, dimana bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa resmi.

C. Penilaian

Tahap terakhir dari perencanaan bahasa terkait pembakuan eksonim adalah dilakukan penilaian atas program yang dilaksanakan. Tahap ini menurut Moeliono (1981) terjadi secara tumpang tindih seiring dijalankannya program pada tahap pelaksanaan. Tahap penilaian secara bersamaan meliputi adanya umpan balik (feedback) dari sasaran perencanaan bahasa. Penilaian dapat dilihat melalui diterima atau tidaknya bentuk baku eksonim oleh sasaran perencanaan. Selain itu, Moeliono (1981) menegaskan bahwa penilaian pada hakikatnya adalah penyimpulan apakah hasil dari strategi perencanaan bahasa sesuai dengan hasil yang diramalkan.

Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi panduan ejaan eksonim untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Mengingat bahwa perencanaan bahasa tidak akan berjalan apabila arah perencanaan tidak diterima oleh masyarakat, maka penting untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna referensi set eksonim dan melakukan revisi baik panduan maupun program jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan perubahan penggunaan dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, perlu adanya penilaian yang sistematis dari penggunaan eksonim sehingga umpan balik yang diperoleh dapat digunakan secara berkelanjutan untuk membuat kebijakan yang lebih strategis dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan mengenai pembakuan eksonim sebagai bagian dari langkah strategis internasionalisasi bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa pembakuan eksonim merupakan salah satu langkah penting yang harus ditempuh demi tercapainya peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional. Sebagai bahasa Internasional, bahasa Indonesia perlu memiliki set eksonim yang tertata dan lengkap sehingga dapat membuktikan kemampuannya beradaptasi di kancah global. Berkaitan dengan tujuan tersebut, bahasa Indonesia masih perlu memiliki

pedoman adaptasi fonologis dan pedoman umum unsur serapan sebagai referensi kebahasaan yang mampu menjelaskan pembakuan eksonim sehingga sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan kaidah yang direkomendasikan secara internasional. Oleh karena itu, berbagai pihak harus terlibat dalam proses perencanaan pembakuan eksonim dan mampu bekerjasama demi mencapai pembakuan eksonim yang sesuai dengan preferensi penutur bahasa Indonesia juga memperhatikan unsur budaya dan politik.

Penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan pembaca terkait pentingnya penggunaan eksonim dan kaitannya dengan perkembangan bahasa. Meskipun demikian, penelitian ini terbatas pada pengetahuan serta langkah-langkah umum yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan khususnya dalam bidang pembinaan dan pengembangan bahasa, namun tetap perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai langkah-langkah konkret dan strategis terkait pembakuan eksonim di Indonesia sehingga arahnya mampu mendorong fungsi internasionalisasi bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S. (1976). *Language Planning for Modernization: The Case of Indonesian and Malaysian*. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. <https://doi.org/10.1515/9783110819106>
- Amruddin. (2022). Paradigma kuantitatif, teori dan studi pustaka. In *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Eds.). Bandung: Media Sains Indonesia.
- Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi Konferensi Umum UNESCO. (2022). In Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Retrieved from <https://setkab.go.id/bahasa-indonesia-jadi-bahasa-resmi-konferensi-umum-unesco/>
- Bahasa Indonesia, Salah Satu Bahasa Negara yang Berkembang Pesat di Dunia. (2022). In Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Retrieved from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/04/bahasa-indonesia-salah-satu-bahasa-negara-yang-berkembang-pesat-di-dunia#:~:text=Menurut%20catatan%20>

- [riset%20etnolog%20yang%20dilaporka
n%20pada%20bulan.juta.%20Sementar
a%20itu%20C%20penutur%20bahasa%
20Melayu%2019%20juta](#)
- Fishman, J. A., Das Gupta, J., Jernudd, B. H., & Rubin, J. (1971). Research outline for comparative studies of language planning. In B. H. Jernudd & J. Rubin (Eds.), *Can Language be Planned?: Sociolinguistic Theory for Developing Nations* (pp. 279–292). University of Hawai'i Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv9zckn9.21>
- Haugen, E. (1966). *Language conflict and language planning the case of modern Norwegian*. London: Oxford University Press.
- Introduction. (n.d). In United Nation Group of Experts on Geographical Names. Retrieved from <https://ungegn.zrc-sazu.si/Home>
- Jordan, P. (2007). Criteria for the use of exonyms. In *Ninth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names*, New York (pp. 21-30).
- Kongres Bahasa Indonesia XII. (2023). Retrieved from <https://kbi.kemdikbud.go.id/portal.ph>
- Lauder, F. A., Lauder, M. RMT. (2015). Ubiquitous place names; Standardization and study in Indonesia. *Wacana, Jurnal of the Humanities of Indonesia*. 16(2). Doi:10.17510/wacana.v16i2.383.
- Lauder, Multamia RMT. (2024). *Konsekuensi Internasionalisasi Bahasa Indonesia*. In *Bincang Budaya Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia*.
- Luxán, M. A., Tagle B. A. (2022). *Exonyms in Spanish. Criteria and usage in cartography*. National Geographic Institute of Spain. Retrieved from <https://www.ign.es/web/libros-digitales/exonimos-en-espanol>
- Moeliono, A. M. (1981). *Pengembangan dan pembinaan bahasa: aancangan alternatif di dalam perencanaan bahasa*. (Doctoral dissertation). Retrieved from <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20424742&lokasi=lokal>
- Ridlo, M., Amalia, R. A., Rahmatunnisa, M. (2019). Situasi bahasa sebagai alat untuk perencanaan bahasa nasional. *Responsive*, 1(3), 86-89. doi:<https://doi.org/10.24198/responsive.v1i3.20743>
- Sneddon, J. (2003). *The Indonesian Language. Its history and role in modern society*. Sydney: UNSW Press.
- Tata Nama Rupabumi. (n.d). In Badan Informasi Geospasial. Retrieved from <https://www.big.go.id/news/2012/07/13/tata-nama-rupabumi#:~:text=Keempat%20lembaga%20tersebut%20berdasarkan%20Peraturan%20Pemerintah%20%28PP%29%20nomor,selanjutnya%20diterbitkan%20ke%20dalam%20sebuah%20buku%20Gasetir%20Nasional>
- Trask, R. L. (2010). *Why do language change*. New York: Cambridge University Press.
- Woodman, P. (2016): Advice on exonyms and their usage. In Jordan, P. & Woodman, P. (eds.). *Criteria for the use of exonyms*. Proceedings of the 17th UNGEGN. Working Group on Exonyms Meeting Zagreb, 14-16 May 2015. Hamburg 2016. ISBN 978-3-8300-8946-9.